

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



---

**BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**  
**Menyerahkan Delapan LHP Kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu**  
**Semester II Tahun 2023**

Kamis, 28 Desember 2023, BPK menyerahkan 8 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Semester II Tahun 2023 yang terdiri dari:

1. Lima Pemeriksaan Kinerja, yaitu:
  - a. Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan *mandatory spending* untuk mendukung belanja daerah yang berkualitas TA 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan instansi terkait lainnya;
  - b. Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sektor unggulan untuk komoditas padi untuk Tahun Anggaran 2021 s.d Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dan instansi terkait lainnya;
  - c. Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sektor unggulan untuk komoditas jagung TA 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan instansi terkait lainnya;
  - d. Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan perdesaan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa Tahun Anggaran 2021 s.d Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Instansi Terkait Lainnya; dan
  - e. Pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Instansi Terkait Lainnya.
2. Tiga Pemeriksaan DTT Kepatuhan, yaitu pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sukamara, Pemerintah Kabupaten Katingan, dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, **M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CA., CSFA.** dan diterima oleh Ketua DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakilinya.

---

**Informasi lebih lanjut:**

**Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Telp/WA: 082211124518**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 8 LHP yang diserahkan pada hari ini, antara lain:

1. Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan *mandatory spending* untuk mendukung belanja daerah yang berkualitas TA 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan instansi terkait lainnya.  
Secara umum, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan upaya-upaya dalam pengelolaan *mandatory spending* untuk mendukung belanja daerah yang berkualitas. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat beberapa permasalahan signifikan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu
  - a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya mengutamakan perencanaan *mandatory spending* atas program kegiatan yang telah tersedia dananya pada BUD yang berakibat pada target dalam RPJMD berpotensi tidak dapat tercapai dan Belanja Daerah berpotensi tidak dapat mewujudkan belanja daerah yang berkualitas sesuai dengan target dalam RPJMN dan RPJMD;
  - b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum memenuhi anggaran *mandatory spending* unsur pengawasan sehingga berpotensi tidak tercapainya tujuan *mandatory spending* dalam rangka tercapainya belanja daerah yang berkualitas.
2. Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sektor unggulan untuk komoditas padi untuk Tahun Anggaran 2021 s.d Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dan instansi terkait lainnya  
Secara umum, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah melakukan upaya-upaya dalam pengembangan sektor unggulan untuk komoditas padi. Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat beberapa permasalahan signifikan, yaitu
  - a. Pemerintah Kabupaten Kapuas belum sepenuhnya menyusun strategi pengembangan padi pada sektor hulu;
  - b. Pemerintah Kabupaten Kapuas belum optimal dalam memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan padi;
  - c. Pemerintah Kabupaten Kapuas belum memiliki kebijakan atau kerja sama dalam rangka pengembangan produk turunan padi.
3. Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan sektor unggulan untuk komoditas jagung TA 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan instansi terkait lainnya  
Secara umum, Pemkab Barito Utara telah melakukan upaya-upaya dalam pengembangan sektor unggulan untuk komoditas jagung. Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan signifikan yaitu

---

**Informasi lebih lanjut:**

**Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Telp/WA: 082211124518**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



- a. Pemkab Barito Utara belum sepenuhnya memiliki strategi pengembangan komoditas unggulan pada sektor hulu;
  - b. upaya Pemkab Barito Utara dalam menyediakan prasarana dan sarana budi daya jagung belum optimal;
  - c. Pemkab Barito Utara belum membuat strategi pengembangan produk unggulan daerah pada sektor hilir;
  - d. pembagian tugas, sistem koordinasi dan kerjasama antar OPD, serta strategi dan target pengembangan produk olahan jagung tidak jelas dan tidak terukur;
  - e. Pemkab Barito Utara belum melakukan peningkatan kualitas daya tarik produk olahan jagung.
4. Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan perdesaan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa Tahun Anggaran 2021 s.d Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Instansi Terkait Lainnya

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan upaya-upaya dalam pembangunan kawasan perdesaan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat beberapa permasalahan signifikan yang harus menjadi perhatian yaitu

- a. Perubahan dan sosialisasi pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Kotawaringin Barat belum dilakukan. Permasalahan tersebut mengakibatkan perangkat daerah yang masuk dalam TKPKP Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mengetahui tugas dan fungsinya di dalam pembangunan kawasan perdesaan serta perencanaan program/kegiatan pembangunan kawasan perdesaan tidak terintegrasi dengan perencanaan program/kegiatan pada perangkat daerah terkait;
- b. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kabupaten Kotawaringin Barat tidak selaras dengan perkembangan kawasan perdesaan saat ini. Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak tercapainya maksud dan tujuan RPKP, khususnya sektor pertanian yang terpadu dan berkelanjutan;
- c. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum sepenuhnya mengupayakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau BUM Desa Bersama berperan dalam mengembangkan komoditas unggulan dari mulai produksi, pengolahan sampai pemasaran.

---

**Informasi lebih lanjut:**

**Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Telp/WA: 082211124518**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



5. Pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Instansi Terkait Lainnya  
Secara umum, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah melakukan upaya-upaya dalam pemajuan kebudayaan dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat beberapa permasalahan signifikan yang harus menjadi perhatian yaitu
  - a. Pemajuan kebudayaan Kabupaten Pulang Pisau belum didukung dengan regulasi yang memadai, sehingga mengakibatkan kegiatan dalam pemajuan kebudayaan di Kabupaten Pulang Pisau tidak memiliki acuan pelaksanaan yang lengkap dan jelas;
  - b. upaya perlindungan warisan budaya pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau belum sepenuhnya memadai, sehingga mengakibatkan warisan budaya berisiko hilang, rusak atau musnah.
6. Pemeriksaan DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sukamara, Pemerintah Kabupaten Murung Raya, dan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Hasil PDDT Kepatuhan atas Belanja Daerah menunjukkan terdapat sejumlah permasalahan:

- a. pada proses perencanaan diketahui permasalahan diantaranya perencanaan kegiatan tidak memadai dan pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan;
- b. pada proses pengadaan diketahui permasalahan diantaranya proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan dan pelaksanaan lelang secara proforma; dan
- c. pada proses pertanggungjawaban diketahui permasalahan diantaranya kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, dan Pemahalan harga (*Mark up*), spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak.

Total nilai temuan atas permasalahan tersebut di atas senilai Rp19,48 miliar serta denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah senilai Rp2,25 miliar. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan pengembalian ke Kas Daerah senilai Rp103,53juta.

Pasal 20 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Pejabat (Pemerintah Daerah) wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima. Selanjutnya pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa lembaga perwakilan (DPRD) menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

---

**Informasi lebih lanjut:**

**Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Telp/WA: 082211124518**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**